KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Percepat pengembangan pasar karbon, DPR usul ada Kementerian menangani perubahan iklim
Tanggal : Senin, 12 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Percepat Pengembangan Pasar Karbon

DPR Usul Ada Kementerian Menangani Perubahan Iklim

Anggota Komisi XII DPR Ateng Sutisna menyarankan pembentukan kementerian atau lembaga khusus perubahan iklim. Langkah ini akan memperkuat tata kelola iklim nasional sekaligus mengakselerasi pengembangan pasar karbon Indonesia.



Ateng Sutisna

MENURUT Ateng, krisis iklim saat ini sudah dirasakan langsung masyarakat dalam bentuk banjir rob, gelombang panas, polusi udara, hingga cuaca ekstrem. Jika tidak ditangani secara serius, kenaikan muka air laut bahkan berpotensi mengancam hingga 180 juta warga pesisir dan memangkas Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 30-40 persen pada 2050.

"Situasi ini ironis. Di tengah ancaman krisis iklim yang semakin nyata, respons kelembagaan kita justru masih terfragmentasi dan belum menunjukkan kepemimpinan yang kuat," ujar Ateng dalam keterangannya, Minggu (11/1/2026).

Dia lalu menyoroti kinerja Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) yang diluncurkan sejak September 2023, namun hingga kini belum menunjukkan capaian signifikan. Hingga pertengahan 2025, total transaksi karbon baru mencapai sekitar 1,6 juta ton CO_2e dengan nilai sekitar Rp 78 miliar.

Kondisi pasar karbon, lanjutnya, kian memprihatinkan ketika pada Juni 2025 volume perdagangan anjlok hingga 98 persen. Sepanjang bulan itu, hanya delapan ton kredit karbon yang berhasil diperdagangkan.

"Fakta sekitar 90 persen pembeli kredit karbon masih berasal dari dalam negeri, menunjukkan rendahnya kepercayaan dan minat investor global terhadap pasar karbon Indonesia," jelas legislator PKS itu.

Dia bilang, akar persoalan utama terletak pada fragmentasi kewenangan dalam penanganan perubahan iklim dan perdagangan karbon. Saat ini, urusan tersebut tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Sedangkan koordinasi hanya dilakukan melalui komite lintas sektor yang tidak memiliki fokus utama pada isu iklim.

Tumpang-tindih kewenangan itu berdampak pada proses perizinan dan sertifikasi proyek karbon menjadi berbelit dan lamban. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian kebijakan yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan investor. "Ini jelas menghambat dan melemahkan daya tarik pasar karbon nasional," tegasnya.

Berikutnya, dia menyinggung rendahnya harga kredit karbon domestik yang masih berada di kisaran 2-5 dolar AS (sekitar Rp 32 ribu-80 ribu) per ton. Angka itu jauh tertinggal dibanding pasar karbon Uni Eropa yang telah mencapai 60-90 dolar AS (sekitar Rp 960 ribu-Rp 1,44 juta) per ton.

Ateng menyebut, negara yang memiliki kementerian khusus perubahan iklim terbukti mampu menurunkan emisi karbon per kapita dalam waktu relatif singkat. Keberadaan lembaga khusus dinilai mampu memperkuat fokus kebijakan, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta membangun kredibilitas pasar karbon.

RUU Perubahan Iklim, lanjutnya, akan mendorong Pemerintah mengambil langkah tegas melalui tiga opsi kelembagaan. Opsi itu meliputi pembentukan kementerian khusus perubahan iklim, penguatan lembaga lingkungan hidup jadi badan strategis lintas sektor, atau pembentukan regulator khusus dengan kewenangan jalur cepat untuk sertifikasi dan penegakan hukum karbon.

Anggota Komisi XII DPR Eddy Soeparno menambahkan, perubahan iklim telah memasuki tahap krisis dan dampaknya dirasakan semakin dekat. Harus ada upaya serius agar krisis ini tidak semakin parah dan berubah menjadi bencana iklim.

Wakil Ketua Umum PAN itu menyebut, sepanjang 2025 krisis iklim terbukti berdampak paling besar pada kelompok ekonomi lemah. Banjir rob, hujan ekstrem berkepanjangan, hingga bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan ketimpangan dampak krisis iklim.

Karena itu, Pemerintah kudu menjadikan 2026 sebagai tahun mitigasi krisis iklim. "Tanpa agenda mitigasi yang jelas dan terarah, dampak krisis iklim akan terus memburuk dan memperlebar kerentanan sosial," pungkas Eddy. ■ PYB